

Buletin **BANGAWAS** **MEDIA INFORMASI** Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

"SEJARAH PEMILU"

Catatan Sejarah
Pengawasan Pemilu di
Tanah Bangka

"JELAJAH PENGAWASAN"

Jelajah Pengawasan
Partisipatif, Barometer
Gerakan Masyarakat
Babel Awasi Pemilu 2024

"DUKUN KAMPUNG"

Sasar "Dukun
Kampung" Untuk Cegah
dan Awasi Pemilu 2024



TANTANGAN PENGAWAS PEMILU AWASI VERIFIKASI PARTAI POLITIK

DAFTAR ISI

SAPA REDAKSI

3

4

JELAJAH PENGAWASAN PARTISIPATIF,
BAROMETER GERAKAN MASYARAKAT
BABEL AWASI PEMILU 2024

6

BAWASLU WAJIB MAKSIMALKAN
PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL,
BERHARAP TIDAK ADA SENGKETA
PROSES

7

BAWASLU AWASI VERIFIKASI PARTAI
POLITIK MULAI DARI TAHAPAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI

8

DISINI INTEGRITAS DIPERTARUHKAN,
BAWASLU BABEL PASTIKAN JAJARANYA
TAK TERLIBAT PARTAI POLITIK

10

BAWASLU BABEL SAMPAIKAN HASIL
PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI
PENDAFTARAN PARPOL

12

KOORDINASI SESAMA PENYELENGGARA
DIBUTUHKAN DALAM PENGAWASAN
VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU

13

SASAR “DUKUN KAMPUNG” UNTUK
CEGAH DAN AWASI PEMILU 2024

14

GANDENG BURUH PELABUHAN
TOLAK POLITIK UANG

CATATAN SEJARAH PENGAWASAN PEMILU DI TANAH BANGKA

15



16

BAWASLU BABEL UPAYAKAN TAK ADA SENGKETA PROSES DALAM TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024



PUBLIK HARUS PAHAM PRODUK HUKUM PEMILU, AGAR TAK ADA SENGKETA PROSES PEMILU

17



18

KONSOLIDASI KESEKRETARIATAN BAWASLU BABEL DALAM MENDUKUNG PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU

19

Galeri



Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Awas !!!

Syukur alhamdulillah hingga saat ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih konsisten dengan Keterbukaan Informasi Publik melalui berbagai sarana media publikasi yang dimiliki. Salah satu sarana yang dimanfaatkan Bawaslu yakni melalui Buletin “Bang Awas !!!” Edisi Kedua Tahun 2022. Dalam edisi ini awak redaksi hendak menyapa pembaca dengan karya publikasi bertemakan “Tantangan Awasi Verifikasi Partai Politik (Parpol) Calon Peserta Pemilu”.

Berbagai informasi, gagasan, maupun fakta kami suguhkan dalam edisi ini. Namun dalam edisi ini kami ingin fokus memberikan informasi kepada publik mengenai konsistensi, integritas dan kerja keras kami saat mengawasi tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. Selain itu, ada juga hasil pengawasan tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. Percikan-percikan pengetahuan itu tak lain sebagai upaya Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan Pendidikan politik bagi masyarakat khususnya tahapan dalam pengawasan pemilu. Sebab dengan pendidikan politik yang baik, ada secercah harapan bahwa sistem demokrasi di negeri tercinta ini juga semakin membaik.

Apalagi, salah satu ciri iklim demokrasi yang baik adalah ditandai dengan partisipasi masyarakat. Bukan hanya partisipasi menggunakan hak pilihnya, tapi juga partisipasi pengawasan dalam setiap tahapan yang ada. Dengan hadirnya buletin ini, mudah-mudahan bisa memberikan asupan pengetahuan, sehingga bisa turut sama-sama mengawasi jalannya perhelatan lima tahunan ini. Sebab, untuk menyukseskan Pemilu ini, bukan hanya ada di tangan penyelenggara, tapi juga butuh keterlibatan dari banyak pihak; mulai dari peserta, Partai Politik, aparat keamanan, stakeholder, maupun masyarakat. Dengan adanya keterlibatan secara simultan melalui caranya masing-masing, harapannya pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mendatang dapat bermartabat, akuntabel, dan bersih.

Tentu karya yang ada di tangan pembaca ini tidaklah sempurna, Sebab, hanya Tuhan dan Rosul-Nya pemilik kesempurnaan. Dengan demikian, saran yang konstruktif dari pembaca dibutuhkan demi kemajuan buletin ini. Terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab : EM Osykar, S.IP.,M.Sc., Jafri, S.Pd.Si.,M.Pd., Sahirin, S.Pd.I., Dewi Rusmala, S.Pd., M.Pd., Andi Budi Prayitno, S.Sy.

Redaktur : Roy M Siagian, S.Sos, M.Si., **Editor :** Rogrius Sinulingga, S.E. **Fotografer :** Rini Oktavyanti, S.IP.,

Sekretariat : Siti Jamilah, S.E.,M.M., Yaumil Ikrom, S.I.P., Rezi Prayoga, S.Sos.

Desain Grafis : Musri Agustian, A.Md., **Penulis Artikel :** Jazzkyanda, S.H., Anne Indah Yusnita, S.H., Abdul Fakihi, S.H., Syahril, A.Md.

Alamat Redaksi :

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Mendanau No. 2
Air Itam Pangkalpinang, Indonesia 33418, Telp. 0717-9114210, Email : administrasi@bawaslu-babelprov.go.id



JELAJAH PENGAWASAN PARTISIPATIF, BAROMETER GERAKAN MASYARAKAT BABEL AWASI PEMILU 2024

EM Osykar (Ketua Bawaslu Babel)

Bangka Belitung adalah salah satu Provinsi yang menyimpan arsip bersejarah dalam catatan lahirnya semangat dari pengawasan Pemilu, yaitu pada saat sang proklamator Ir. Soekarno diasingkan di Pesanggrahan Muntok, Kabupaten Bangka Barat tahun 1948 – 1949. Kehadiran Sang Proklamator bersama beberapa pahlawan Bangsa di Bangka Belitung merupakan bagian dari sejarah pada masa Agresi Militer II Belanda yang menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia pada waktu itu.

Berdasarkan dokumen yang terisisa di Pesanggrahan Muntok, terdapat dokumen bersejarah yang ditulis tangan oleh Ir. Soekarno berisikan beberapa semangat demokrasi untuk menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil yang di awasi oleh organisasi untuk memimpin dan mengawasi pemungutan suara.

**‘Agar supaya kehendak rakyat Bangka itu dapat dikemukakan dengan sempurna di dalam sesuatu pemungutan suara, maka perlu dibangun satu Organisasi untuk memimpin dan mengawasi pemungutan suara itu’
(Ir. Soekarno)**

Tulisan tersebut ditulis dan ditandatangani oleh sang proklamator tanggal 21 Februari 1949 di Pesanggrahan Muntok, Bangka Barat. Hal inilah yang menjadi embrio cikal bakal lahirnya semangat pengawasan Pemilu di Indonesia. Akan tetapi Pemilu pasca reformasi tidak cukup hanya diawasi oleh Bawaslu saja. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Pengawasan partisipatif bertujuan untuk mentransformasikan rasa kepedulian atas hak – hak politik warga negara menjadi Gerakan pengawasan yang massif. Keterlibatan masyarakat pengawasan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Melalui tulisan bersejarah itu, hari ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginternalisasikannya dalam bentuk program Jelajah Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan semangat pengawasan pemilu dari rakyat untuk rakyat, karena kedaulatan tertinggi negara demokrasi ada ditangan rakyat.

Harapan besar pula mendorong Jelajah Pengawasan Partisipatif ini dibangun atas dasar kesadaran, kerelawanan dan panggilan hati nurani untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Jelajah Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah program inovasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digagas sejak tahun 2015 - 2022. Ide dasar program ini berawal dari pencegahan pelanggaran berdasarkan hasil deteksi dini kerawanan Pemilu dan Pemilihan disetiap tahapan yang kemudian kerawanan tersebut terpetakan dalam beberapa aspek yang lebih rinci sehingga lebih terspesifikasi sasaran programnya. Lalu disusunlah sebuah strategi pencegahan pelanggaran melalui pelibatan masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya.



Menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang, program Jelajah Pengawasan Pemilu Partisipatif semakin rutin dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelum program ini dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memetakan kerawanan Pemilu dengan merujuk kepada Indeks Kerawanan Pemilu Bangka Belitung di setiap Kabupaten/Kota, yang kemudian terpetakan beberapa permasalahan mendasar menjadi fokus Bawaslu dalam Jelajah Pengawasan yaitu Politik uang, Keterpenuhan Hak Pilih, Partisipasi masyarakat marjinal, komunitas, dan kelompok sosial, Media independen, Isu Hoax, Politisasi SARA dan Ujaran Kebencian, dan eksistensi penyelenggara.

Pada bulan Oktober s.d November 2022 ini, setidaknya Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali Jelajah Pengawasan Pemilu Partisipatif di 6 Kabupaten dan 1 Kota dengan melibatkan paling tidak 280 orang masyarakat. Sasarannya juga sangat variatif yang ditentukan dengan karakteristik masyarakat di setiap Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan tingkat kerawannya.

Pada bulan Oktober – November 2022 sasaran masyarakat pada Jelajah Pengawasan Pemilu Partisipatif tahun 2022 ini yaitu Lembaga Adat Kedudukan Belitung Timur untuk memperkuat relasi kuas tokoh “dukun kampung” untuk melindungi warganya dari segala bentuk kecurangan, Kelompok Buruh Kuli Pelabuhan Tanjung Pandan sebagai pemilih profesi marjinal, Kelompok Etnis Thionghoa sebagai pemilih marjinal, kelompok pemilih santri sebagai kelompok pemilih pemula rentan dan juga yang jarang tersentuh oleh Stakeholder kepeemiluan,

Kelompok Etnis Thionghoa sebagai pemilih marjinal, kelompok pemilih santri sebagai kelompok pemilih pemula rentan dan juga yang jarang tersentuh oleh Stakeholder kepeemiluan, dan yang terakhir Insan Media, dan Influencer yang menjadi sasaran strategis untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilu untuk diawasi bersama melalui media mainstream dan media sosial.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melibatkan beberapa tokoh penting seperti Sejarawan untuk menggali Sejarah Pengawas Pemilu melalui catatan Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno ketika diasingkan di Muntok, Kabupaten Bangka Barat tahun 1948 – 1949. Tulisan Soekarno tersebut telah membawa Bawaslu Babel ke Muntok untuk menjelajahi sejarah pengawasan pemilu dan pentingnya sebuah pemilihan yang harus diawasi bersama. Kita patut berbahagia karena ternyata, ditengah Bangka ini telah tertulis sejarah bahwa Semangat demokrasi itu telah tumbuh sejak lama yang menjadikan masyarakat Bangka masuk ke dalam republik Indonesia.

Isu strategis yang diantisipasi oleh Bawaslu melalui program ini juga beragam, yang pada intinya Bawaslu mengajak masyarakat memerangi politik uang, ujaran kebencian, hoax, politisasi SARA, konflik kelompok sosial di tahun politik, dan mengajak bersama – sama mengawasi hak politik masing – masing. Pesan kemanusiaan dalam Jelajah Pengawasan Pemilu Partisipatif diharap menjadi pesan berantai dengan semangat mencegah pelanggaran dari dalam diri masing – masing. Masyarakat dapat melindungi haknya, hak keluarganya dari kecurangan yang bisa saja terjadi disekitar mereka. Bawaslu berharap Jangan Sampai Kedaulatan rakyat kita terbeli, karena itu sama saja membunuh cita - cita anak bangsa kedepan. Mari relakan politik uang, jadilah pemilih cerdas dan berintegritas. Merdeka !!

Bawaslu Wajib Maksimalkan Pengawasan Verifikasi Faktual, Berharap Tidak Ada Sengketa Proses

Seperti yang telah kami bahas pada bahan bacaan sebelumnya bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat berupaya agar proses pelaksanaan Verifikasi Faktual ini tak berujung pada Sengketa Proses Pemilu. Upaya pencegahan terus dilakukan sebaik mungkin seperti dengan memberikan Pendidikan politik kepada Calon Peserta Pemilu.

Hal ini sejalan dengan tanggapan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung EM Osykar. Menurut Osykar pencegahan terjadinya sengketa dan pelanggaran harus dimaksimalkan dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi dan komunikasi yang baik antar penyelenggara. Ia menyebutkan pencegahan terjadinya sengketa dan pelanggaran harus dimaksimalkan dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi dan komunikasi yang baik antar penyelenggara, hal tersebut disampaikan ia saat membuka acara kegiatan Rapat Evaluasi Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Babel.



EM Osykar (Ketua Bawaslu Babel)

Dalam melaksanakan pengawasan tahapan Verifikasi Partai Politik ini membutuhkan sinergisitas yang baik antara Bawaslu dan KPU. Bisa saja Bawaslu dan KPU mempunyai data berbeda sehingga perlu diselaraskan saat verifikasi di lapangan. Akan lebih mudah apabila yang difaktual korporatif dalam artian selalu merespon setiap keperluan Verifikasi Partai Politik yang ada di setiap wilayah.

“Pencegahan terjadinya sengketa dan pelanggaran harus dimaksimalkan dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi dan komunikasi yang baik antar penyelenggara, jangan sampai kita overlap, fokus saja pada pengawasan”

Untuk memaksimalkan pencegahan Sengketa Proses Pemilu Bawaslu membahas poin-poin hasil pengawasan verifikasi administrasi dan persiapan pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu dilakukan diskusi bersama terkait beberapa poin hasil pengawasan diantaranya verifikasi administrasi perbaikan, laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu selama pengawasan berlangsung, kendala dan hambatan selama proses pengawasan, kesiapan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menghadapi tahapan verifikasi faktual, bentuk-bentuk pencegahan yang akan dilakukan serta langkah-langkah strategis dan fokus pengawasan dalam pelaksanaan verifikasi faktual kedepannya.





Ketua Bawaslu Babel (tengah) bersama Ketua KPU Provinsi Babel dan Ketua Parpol Hanura, saat melakukan pengawasan proses verifikasi vaktual Partai Peserta Pemilu 2024 bersama KPU Provinsi Babel

BAWASLU AWASI VERIFIKASI PARTAI POLITIK MULAI DARI TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI

Dalam tahapan pemilu, melakukan Verifikasi Administrasi (Vermin) menjadi langkah awal munculnya nama-nama Calon Partai Politik peserta pemilu yang akan bertarung dalam kontestasi politik Tahun 2024. Oleh karena itu Verifikasi Administrasi ini bisa dibilang langkah awal untuk menjadi peserta pemilu apabila lolos Verifikasi Administrasi dan dilanjutkan oleh Verifikasi Faktual oleh KPU.

Disini peran Bawaslu sangat berpengaruh untuk mengawasi setiap proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang baik ditingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 yang di ikuti seluruh jajaran Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan hasil pengawasan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 pada kabupaten kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta menyampaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi di masing-masing kabupaten kota.

Berkaitan dengan Pengawasan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 ini Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung EM Osykar menghimbau Bawaslu Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota masing – masing mengenai permasalahan pada semua tahapan pemilu termasuk tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024,

“Koordinasi dengan internal maupun stakeholder pemilu seperti KPU dan instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pemilu sangat dibutuhkan, agar tahapan pemilu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan menghasilkan demokrasi yang berkualitas,”

Sejumlah permasalahan yang wajib Bawaslu waspadi dalam tahapan ini diantaranya akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) harus bisa diakses, karena bukan tidak mungkin suatu system informasi mengalami kendala teknis maupun kendala non teknis lainnya.

Ketua Bawaslu Babel ini juga menghimbau jajaran Bawaslu kabupaten/kota di Babel terkait dengan penguatan lembaga arahan dari Bawaslu RI adalah semangatnya kinerja Lembaga sehingga tidak hanya mengandalkan satu divisi saja melainkan semua divisi harus menguasai tahapan pemilu 2024.



Ketua dan Anggota Bawaslu Babel, saat melakukan pengawasan proses verifikasi vaktual Partai Peserta Pemilu 2024 bersama KPU Provinsi Babel

DISINI INTEGRITAS DIPERTARUHKAN, BAWASLU BABEL PASTIKAN JAJARANYA TAK TERLIBAT PARTAI POLITIK

Melakukan Verifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu merupakan suatu pertanggungjawaban moral bagi Jajaran Pengawas Pemilu dimanapun berada. Karena dalam proses verifikasi ini Bawaslu tidak hanya melaksanakan tugas-tugas pengawasannya melainkan mempunyai tanggung jawab moral untuk menjunjung tinggi integritas dengan menjaga netralitas dari kepentingan partai politik manapun.

Salah satu bentuk netralitas terhadap partai politik yang dilakukan Bawaslu dengan memastikan dirinya tidak terlibat dalam keanggotaan Partai Politik manapun. Oleh karena itu sebelum Bawaslu melakukan verifikasi partai politik ini Bawaslu terlebih dahulu memastikan bahwa mereka tidak terdaftar dalam keanggotaan partai politik.

Dalam mewujudkan pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, integritas menjadi harga mati yang harus melekat dalam diri seorang pengawas pemilu. Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan pencermatan terhadap Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang terindikasi terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPO). Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 87 ayat (4) huruf c UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyatakan bahwa Jajaran Bawaslu dan Sekretariat tidak boleh berafiliasi dan menjadi pengurus/anggota partai politik.



Jafri (Anggota Bawaslu Babel)

Integritas inilah yang harus kami bangun mulai dari Jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di level terendah hingga Jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apalagi saat ini Bawaslu sudah mempunyai Jajaran ditingkat kecamatan yang tentunya akan bersentuhan langsung dengan segala dinamika yang ada di masyarakat.

Kembali ke upaya kami dalam menjaga netralitas dari keterlibatan Jajaran Bawaslu terhadap keanggotaan Partai Politik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan satu orang Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan dua Orang Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah terdata dalam SIPO milik KPU. Padahal setelah dilakukan proses klarifikasi yang bersangkutan merasa tidak pernah terlibat dalam keanggotaan Partai Politik manapun.

“Kami memastikan bahwa tidak ada jajaran Bawaslu yang terdaftar di partai politik, Apabila ada jajaran Bawaslu yang terbukti terlibat dalam partai politik maka akan ditindak secara administratif maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”



Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat melakukan rapat bersama terkait netralitas dari kepentingan Parpol

meskipun berdasarkan hasil pencermatan ada 1 orang jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan yang diduga namanya terdaftar sebagai pengurus salah satu partai politik,” jelas Anggota Bawaslu Babel Jafri yang saat ini mengkoordinatori Divisi SDM, Organisasi dan Pendidikan Politik.

Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Redaksi, Bawaslu Kabupaten yang bersangkutan sudah dimintai keterangan melalui proses klarifikasi, dan hasilnya seluruh indikasi terhadap Jajaran Bawaslu tersebut sama sekali tidak pernah terlibat partai politik maupun,

Hasilnya saat dilakukan klarifikasi tidak ada indikasi keterlibatan partai politik di Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah. Bahkan yang bersangkutan mengaku bahwa pihaknya telah melakukan pencermatan Nama dan NIK terhadap dua orang yang diduga terindikasi terlibat partai politik, namun berdasarkan hasil pencermatan tersebut tak ada unsur kesengajaan Jajaran Bawaslu Bangka Tengah untuk terlibat dalam keanggotaan partai politik,

“Terakit hasil klarifikasi Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah juga tak ditemukan adanya keterlibatan parpol dari Jajaran Bawaslu, jadi data mereka diduga dicatut orang tak bertanggung jawab, Bawaslu Babel akan melaporkan hasil pencermatan Nama dan NIK Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota ke Bawaslu RI,” jelasnya.

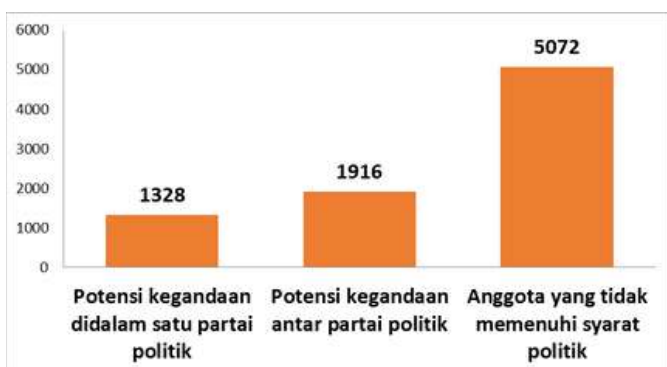
Anggota Bawaslu Babel Jafri yang saat ini masih menjabat di periode keduanya mengaku apabila terdapat Jajaran Bawaslu Babel yang ditemui datanya dalam SIPOL maka akan dilakukan tindakan secara administrasi maupun proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu. Bawaslu Babel akan tetap terus mengawasi proses pendaftaran dan verifikasi partai politik guna memastikan tahapan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bawaslu juga memastikan tidak adanya jajaran Pengawas Pemilu yang terdaftar di partai politik. Apabila ada jajaran Bawaslu yang terbukti terlibat dalam partai politik maka akan ditindak secara administratif maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAWASLU BABEL SAMPAIKAN HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PENDAFTARAN PARPOL

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Pendaftaran Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tanggal 02 Agustus 2022 lalu. Hasilnya terdapat 24 Partai Politik yang memiliki kepengurusan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari pencermatan Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung ditemukan 1.328 potensi kegandaan anggota, 1.916 potensi kegandaan anggota antar Partai Politik, dan 5072 anggota yang tidak memenuhi syarat pada satu partai politik.

Sementara dari hasil Inventarisir Masalah yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan permasalahan pada regulasi yang berubah ubah seperti SK KPU RI Nomor 260 menjadi 309 tahun 2022. Pada SK tersebut point perubahannya adalah penentuan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada keanggotaan Partai Politik yang tidak sesuai dengan indikator pada indetitas berdasarkan E KTP. Akibatnya Bawaslu menilai akan berdampak terhadap proses Verifikasi Administrasi.

Grafik Rekapitulasi Potensi Ganda Keanggotaan Partai Politik



Sahirin (Anggota Bawaslu Babel)

Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sahirin saat dikonfirmasi Tim Redaksi mengatakan dalam menentukan hasil pengawasan ini pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU selaku pelaksana Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024,

“Kami membagi Tim dalam pengawasan Verifikasi ini, setiap Tim harus hadir setiap hari di KPU karena memang objek pengawasannya KPU agar proses Verifikasi Administrasi ini berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku”

REKAPITULASI JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT PADA POSKO BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

NO.	Nama <u>Provinsi/Kabupaten/Kota</u>	<u>Jumlah</u>
1	<u>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</u>	11
2	<u>Kabupaten Bangka Barat</u>	29
3	<u>Kabupaten Belitung Timur</u>	10
4	<u>Kabupaten Bangka Tengah</u>	3
5	<u>Kabupaten Bangka Selatan</u>	1
6	<u>Kabupaten Belitung</u>	0
7	<u>Kabupaten Bangka</u>	0
8	<u>Kota Pangkalpinang</u>	13
TOTAL		67



Ketua dan Anggota serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung foto bersama dengan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menilai adanya keterbatasan akses pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) meskipun Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah memiliki akun SIPO. Karena menu dalam SIPO tidak menampilkan identitas anggota Partai Politik secara utuh seperti KTP Elektronik dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan pemilu dalam tahapan Verifikasi Pendaftaran Partai Politik Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat Posko Aduan Masyarakat pada 7 Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana instruksi Bawaslu RI melalui Surat Instruksi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang pendirian Posko Pengaduan Masyarakat. Tujuannya untuk memberikan ruang pelayanan aduan kepada masyarakat bagi yang merasa keberatan jika namanya terdaftar sebagai anggota Partai Politik. Masyarakat dapat memeriksa NIKnya di dalam web infopemilu.kpu.go.id apakah terdaftar atau tidak di dalam SIPO. Hasilnya selama proses verifikasi administrasi berlangsung, terdapat 67 orang yang sudah menyampaikan aduan ke Posko ini untuk ditangani oleh Bawaslu dan jajarannya.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Pendaftaran Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tanggal 02 Agustus 2022 lalu.

Hasilnya terdapat 24 Partai Politik yang memiliki kepengurusan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari pencermatan Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung ditemukan 1.328 potensi kegandaan anggota, 1.916 potensi kegandaan anggota antar Partai Politik, dan 5072 anggota yang tidak memenuhi syarat pada satu partai politik.

Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan pemilu dalam tahapan Verifikasi Pendaftaran Partai Politik Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat Posko Aduan Masyarakat pada 7 Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana instruksi Bawaslu RI melalui Surat Instruksi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang pendirian Posko Pengaduan Masyarakat. Tujuannya untuk memberikan ruang pelayanan aduan kepada masyarakat bagi yang merasa keberatan jika namanya terdaftar sebagai anggota Partai Politik. Masyarakat dapat memeriksa NIKnya di dalam web infopemilu.kpu.go.id apakah terdaftar atau tidak di dalam SIPO. Hasilnya selama proses verifikasi administrasi berlangsung, terdapat 67 orang yang sudah menyampaikan aduan ke Posko ini untuk ditangani oleh Bawaslu dan jajarannya.

Data aduan yang sudah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota akan ditindaklanjuti dan dialporkan kepada Bawaslu RI serta KPU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KOORDINASI SESAMA PENYELENGGARA DIBUTUHKAN DALAM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Sahirin (Anggota Bawaslu Babel)

Pagi itu jadwal pengawasan Verifikasi Faktual telah diterbitkan. Seluruh Tim Pengawasan Verifikasi Faktual siap meluncur ke wilayah tujuan mereka masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pengawasan Verifikasi Faktual dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga yang terindikasi terlibat dalam keanggotaan Partai Politik, sehingga pengawasan melekat juga dilakukan saat KPU melakukan Verifikasi Faktual langsung kerumah warga.

“Pengawasan Verifikasi Faktual ini dilakukan untuk memantau pengawasan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap KPU Kabupaten/Kota, Alhamdulillah semua berjalan lancar,” ujar Sahirin yang memang mengkoordinatori Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Babel.

Saat Verifikasi Faktual dilakukan, Bawaslu mengawasi proses yang dilakukan oleh KPU terhadap sampel keanggotaan Partai Politik. Pengawasan dilakukan terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh jajaran KPU yang memeriksa kesesuaian identitas pengurus parpol, 30 % keterwakilan perempuan, keberadaan serta keabsahan domisili kantor tetap dan keanggotaan parpol berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menyiapkan instrumen yang berisikan informasi penting yang dibutuhkan dalam tahapan verfak. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didampingi Bawaslu kabupaten/kota memastikan kinerja KPU di kabupaten/kota memverifikasi Partai Politik sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tahapan ini memang membutuhkan koordinasi tingkat tinggi dengan sesama penyelenggara pemilu terutama KPU yang dalam hal ini bertindak langsung memverifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Bawaslu dan KPU harus satu pemahaman dalam hal Memenuhi Syarat (MS) atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) untuk menentukan status keanggotaan partai politik. Mulai dari kesesuaian nama, kesesuaian KTP kesesuaian Kartu Anggota hingga kehadiran Anggota Partai Politik saat dilakukan Verifikasi Faktual. Semua itu harus selaras dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, meskipun masih ada tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan bagi Partai Politik yang Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Anggota Bawaslu Babel Sahirin, saat melakukan pengawasan melekat Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik bersama KPU Kabupaten Bangka Selatan



Sasar “Dukun Kampung” Untuk Cegah dan Awasi Pemilu 2024

Dalam rangka meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif pada Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lakukan kegiatan Jelajah Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Peran Pemangku Adat Dalam Meningkatkan Pelibatan Masyarakat pada Pengawasan Pemilu” di Geosite Tebat Rasau Lintang, Kecamatan Simpang Renggang Kab. Belitung Timur.

Kegiatan Jelajah Pengawasan Pemilu merupakan salah satu ikhtiar Bawaslu dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Selain itu juga kegiatan jelajah pengawasan ini menjadi media untuk melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi dugaan pelanggaran yang terjadi ditengah kehidupan sosial masyarakat agar dapat dilakukan upaya pencegahan.

Pada kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi kep. Babel, Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Belitung Timur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Belitung Timur, Sekretaris Camat Simpang Renggang, Kepala Desa Lintang, dan Perwakilan Dukun Kampung yang terhimpun dalam Lembaga Kedukunan Adat Belitung Timur yang sekaligus menjadi peserta dalam kegiatan tersebut.

.Kegiatan ini menjadi ajang bagi kami untuk bersilaturahmi kepada para sesepuh/dukun kampung untuk mendapatkan nasehat, masukan, dan wejangan bagi kami penyelenggara serta sekaligus melalui kegiatan ini kami mengajak untuk para dukun kampung bersama-sama mengawal dan mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Belitung Timur".

“Peran serta dukun kampung sangat di harapkan untuk menjaga proses demokrasi negara kita sampai dengan lini terkecil yaitu masyarakat setempat, suara mereka sebagai pemangku adat sangat lah didengar oleh masyarakat, oleh karena itu besar harapan kami untuk bapak-bapak untuk dapat mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada disetiap desa untuk menolak segala bentuk kecurangan pemilu yang salah satunya adalah politik uang “.

“Para pemangku adat menjadi salah satu kontrol sosial yang dapat berfungsi untuk menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan pemilu agar dapat terlaksana dengan baik, tuturnya”

Peran dukun kampung dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Belitung Timur memiliki peranan penting dalam menjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Hal ini sama halnya dengan proses pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu, dimana dukun kampung mempunyai peran penting untuk turut serta mencegah dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan pemilu serta meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.



Gandeng Buruh Pelabuhan Tolak Politik Uang

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka gandeng Buruh Pelabuhan untuk mengawasi Pemilu 2024. Melalui kegiatan jelajah pengawasan pemilu partisipatif yang diadakan Cafe Dusun Tanjung Pendam Kabupaten Belitung, Bawaslu Babel dan Bawaslu Belitung hadirkan 40 buruh pelabuhan Tanjung Pandan sebagai peserta jelajah pengawasan pemilu partisipatif pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Kegiatan yang dihadiri oleh narasumber Iswandi dari Syahbandar, Tedja dari Pos Belitung, Heikal Fackar selaku Ketua Bawaslu Belitung, dan Yerri Larona Anggota Bawaslu Belitung.

Iswandi selaku narasumber dari Syahbandar Otoritas Pelabuhan Tanjung Pandan Belitung mengungkapkan bahwa buruh Pelabuhan dan bersama syahbandar secara langsung biasanya hanya berperan untuk mendukung kelancaran distribusi logistik Pemilu,

“Kami turut senang dilibatkan dalam program Jelajah pengawasan pemilu partisipatif ini. Dalam pemilu tugas kita adalah membantu mengawal distribusi logistik, namun pada kesempatan kali ini kita juga diajak bersama – sama Bawaslu untuk mengawasi pemilu 2024 dan menolak segala bentuk politik uang,” ungkapnya.

Menurut Ketua Bawaslu Belitung, Heikal Fackar mengatakan bahwa buruh Pelabuhan ini sangat jarang disentuh oleh Bawaslu, maka dengan kegiatan jelajah pengawasan pemilu ini sangat membantu untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada para buruh untuk mengawasi dan mengawal pemilu 2024 yang demokratis.

Editor Pos Belitung, MC Tedja Pramana juga mengatakan bahwa melalui sosialisasi ini media massa juga punya peran untuk menghadirkan informasi yang akurat dan juga sebagai media memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Untuk meningkatkan peran masyarakat, kita perlu membuka ruang informasi yang akurat, valid, dan agar informasi mengenai pemilu 2024 sampai kepada masyarakat serta harapannya partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat khususnya pada pengawasan pemilu secara partisipatif,” tuturnya.

Sahirin Selaku Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa pada Jelajah Pengawasan Pemilu Partisipatif ini sasaran Bawaslu adalah profesi marjinal seperti Buruh Pelabuhan yang hari ini sudah duduk dan membangun komitmen bersama kita untuk mengawasi pesta demokrasi Pemilu 2024, dan menolak segala bentuk politik uang.

“Jangan Sampai Kedaulatan kita terbeli, kalau hari ini kita merelakan politik uang, dan hari ini kita menyekolahkan anak kita dari keringat kita, dan dia bercita – cita jadi anggota dewan, kades, jadi gubernur. Jadi jangan bunuh mimpi dan cita cita anak kita dengan menerima politik uang,”

Rakyat Bangka kita berkeinginan
republikkan, kita berkeinginan Bang-
ka masuk dalam daerah Republik
Seseorang pemimpin rakyat Bangka
juga tidak berbuat sesuai dengan ke-
hendak rakyat Bangka itu, dan ber-
buat memisahkan rakyat Bangka dari
Republik, adalah berbuat bertentangan
dengan demokrasi, bahkan mengehi-
rkan demokrasi itu.

Agar supaya kehendak rakyat Bang-
ka itu dapat dikemukakan dengan sem-
purna didalam sesuatu pemungutan
suara, maka perlulah dibangun satu
satu organisasi untuk memimpin
dan mengawasi pemungutan suara
itu.

Merdeka!

Soekarno -
Pres.

Muntok 2/2 '49



CATATAN SEJARAH PENGAWASAN PEMILU DI TANAH BANGKA

Pada tulisan Presiden Pertama RI Soekarno
tercantum kalimat :

“Agar supaya kehendak rakyat Bangka
itu dapat dikemukakan dengan
sempurna di dalam suatu pemungutan
suara. Maka perlulah dibangun satu
organisasi untuk memimpin dan
mengawasi pemungutan suara itu.”

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adakan
jelajah pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema
“catatan sejarah pengawasan pemilu di tanah Bangka”
yang dilaksanakan di Pesanggrahan Bangka Tin
Winning (Roemah Persinggahan) Kecamatan Muntok,
Kabupaten Bangka Barat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD,
perwakilan Forkopimda, Kesbangpol, tokoh
masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta awak
media Bangka Barat.

Kegiatan ini berawal dari tulisan Presiden RI Soekarno
ketika diasingkan di Muntok Tahun 1949.

Menurut Sahirin Koordiv Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat dan Humas
mengatakan bahwa, tulisan Soekarno
tersebut telah membawa Bawaslu Babel ke
Muntok untuk menjelajahi sejarah
pengawasan pemilu dan pentingnya sebuah
pemilihan yang harus diawasi bersama.

“Kita patut berbahagia karena ternyata,
ditanah Bangka ini telah tertulis sejarah
bahwa Semangat demokrasi itu telah
tumbuh sejak lama yang menjadikan
masyarakat Bangka masuk ke dalam
republik Indonesia.”





Dewi Rusmala (Anggota Bawaslu Babel)

Salah satu langkah yang wajib dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) selaku penyelenggara pemilu yakni mencegah segala bentuk pelanggaran pemilu. Akan lebih baik apabila bisa memberikan pemahaman kepada seluruh peserta pemilu agar tak ada Sengketa Proses Pemilu dalam melaksanakan tahapan pemilu. Untuk itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan upaya pencegahan tersebut dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dalam Rangka Pencegahan Sengketa Proses.

Kegiatan ini menghadirkan peserta Rakor dari 24 Pengurus Partai Politik (Parpol) tingkat provinsi. Untuk narasumber Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengundang Husein Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengampu Divisi Teknis. Dalam kegiatan ini KPU Provinsi menyampaikan materi terkait teknis pendaftaran, verifikasi, sampai dengan penetapan parpol peserta pemilu 2024 sedangkan Bawaslu Provinsi menyampaikan materi terkait pengawasan dalam rangka melakukan pencegahan.

Materi ini jelas erat kaitannya dengan tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang akan diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bawaslu menganggap Partai Politik harus benar - benar memahi proses dan mekanisme Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 agar tak ada kesalahan yang berujung pada Sengketa Proses Pemilihan Umum.

BAWASLU BABEL UPAYAKAN TAK ADA SENGKETA PROSES DALAM TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024

Anggota Bawaslu Babel Dewi Rusmala saat dikonfirmasi Tim Humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengatakan bahwa Bawaslu sengaja melakukan Rakor ini sebagai langkah pencegahan sengketa proses yang dimungkinkan terjadi saat Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

“Bawaslu menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka pencegahan sengketa proses. Dengan harapan antara penyelenggara pemilu dengan parpol dapat duduk bersama,”

Seyogyanya pendaftaran dan verifikasi parpol pada Pemilu 2024 berbeda dari Pemilu 2019. Tahun 2019 Parpol disibukkan hadir secara fisik di kantor KPU provinsi masing-masing namun saat ini semua dipusatkan di KPU RI, sementara ditingkat KPU Kabupaten/Kota hanya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan ditingkat provinsi akan ada verifikasi faktual Pengurus Parpol.

Dengan terselenggaranya Rakor jajaran Bawaslu berharap Parpol bisa memperoleh pemahaman sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak sampai terjadi sengketa proses. Sengketa tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan, proses sengketa memakan waktu dan biaya, untuk itu Bawaslu lebih mendorong peserta pemilu fokus mempersiapkan diri tampil sebagai peserta menjaring suara pemilih.

Meski demikian tak menapik kemungkinan terjadinya sengketa proses, namun Bawaslu tetap menghimbau agar partai politik tetap mengikuti mekanisme sengketa sesuai dengan aturan yang berlaku karena perbedaan persepsi sangat mungkin terjadi oleh karena itu penting untuk saling berkomunikasi demi terselenggaranya penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.



Anggota Bawaslu Babel, Dewi Rusmala dan Jafri di dampingi Anggota KPU Provinsi Babel foto bersama dengan 24 Pengurus Parpol dalam acara Rakor Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024

PUBLIK HARUS PAHAM PRODUK HUKUM PEMILU, AGAR TAK ADA SENGKETA PROSES PEMILU

Dalam melaksanakan tugas fungsi pengawas pemilu, Bawaslu berkomitmen akan mengutamakan upaya pencegahan sebelum melakukan pengawasan dan penindakan. Cara ini dinilai lebih efektif dibandingkan apabila sudah ada pelanggaran kemudian ditindak. Konsep ini mengupayakan seminimal mungkin pelanggaran pemilu dengan terlebih dahulu mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Untuk itu dalam hal ini mensosialisasikan produk hukum pemilu dinilai termasuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Agenda sosialisasi yang digelar di Hotel BW Suite Kabupaten Belitung ini sejalan dengan napa yang diinginkan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Andi Budi Prayitno. Menurutnya saat Tim Redaksi meminta pendapat terkait kegiatan sosialisasi produk hukum ini merupakan upaya pencegahan yang efektif dalam proses kerja Bawaslu.

“Kita berharap penyelesaian sengketa tidak banyak, artinya kita upayakan pencegahan,” ungkap Andi Budi Prayitno saat dikonfirmasi Tim Redaksi Humas Bawaslu Babel.

Selain itu lanjutnya perlu adanya komunikasi yang baik antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sehingga sengketa proses Pemilu dapat dicegah, “perlu adanya pelaksanaan yang maksimal dalam tahapan verifikasi faktual, sebab jangan sampai nanti dalam pengawasan verifikasi faktual di kemudian hari menjadi masalah yang akhirnya terjadi permohonan sengketa,” ujarnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akrab disapa ABP ini juga menyampaikan bahwa kerja-kerja pengawasan selain membutuhkan stamina yang baik, juga membutuhkan integritas bagi penyelenggara Pemilu,

“Kita harus meminimalisasi terjadinya sengketa Pemilu. Di internal Bawaslu tugas kita adalah mengawasi, tapi jangan lupa bahwa kita juga diawasi, kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang humanis,” ujarnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan Dr. Sukoco, S.H., M.H dari Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sebagai narasumber. Menurut Dr Sukoco juga posisi Bawaslu dalam Pemilu sangat strategis. Karena Bawaslu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk menyelesaikan sengketa proses dan penanganan pelanggaran Pemilu. Untuk itu, ia berharap tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut, jangan sampai tidak dimaksimalkan oleh Bawaslu.

“Jangan sampai Bawaslu tidak bisa mewujudkan Pemilu yang jujur dan berkeadilan,” tegasnya.



Andi Budi Prayitno (Anggota Bawaslu Babel)

Penyelesaian sengketa proses lanjutnya, merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan antara pihak yang bersengketa, yakni antara Peserta Pemilu dan KPU. Dalam paparnya ia menjelaskan, bahwa Pemilu yang berkeadilan cirinya ada dua, yaitu: Kepastian tindakan, keputusan, dan prosedur sejalan dengan hukum; dan Adanya perlindungan terhadap hak-hak yang ada dalam pemilu.

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri peserta dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Babel, perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, Pimpinan Parpol di Kabupaten Belitung, KPU Kabupaten Belitung, dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belitung.



Anggota Bawaslu Babel Andi Budi Prayitno foto bersama Pimpinan Parpol dan Pemda Kabupaten Belitung serta Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu se Provinsi Babel

Konsolidasi Kesekretariatan Bawaslu Babel dalam Mendukung Pengawasan Tahapan Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sejak 14 Juni 2022. Segala tahapan dan jadwal mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024 tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal ini berarti Sekretariat Bawaslu juga harus siap baik dari kesiapan teknis pengawasan pemilu maupun kesiapan dukungan kesekretariatan dalam mendukung proses pengawasan tahapan pemilu yang dilakukan.

Salah satu dukungan maksimal yang diberikan oleh kesekretariatan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwacam) di seluruh kabupaten/kota di Bangka Belitung. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pendampingan secara maksimal yang terjun langsung dalam proses dan tahapan rekrutmen Panwascam. Bawaslu telah membagi tim bersama Pimpinan Bawaslu untuk mengawasi langsung tahapan rekrutmen mulai dari pelaksanaan tes tertulis berbasis CAT, pelaksanaan wawancara hingga proses pelantikan Panwascam di tujuh Kabupaten/Kota di Bangka Belitung.

Menjadi Pengawas Pemilu Kecamatan berarti siap untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu, artinya sebagai seorang pengawas pemilu dituntut untuk netral dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan pemilu terutama dalam proses penanganan pelanggaran pemilu. Integritas harus dikedepankan dalam mencegah, mengawasi dan menindak segala potensi pelanggaran yang ada di kecamatan masing-masing.

Dalam bekerja kita tidak hanya harus netral namun juga profesional sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Untuk menunjang itu semua, maka penyelenggara pemilu dituntut untuk bisa memahami semua prosedur dan tata cara penanganan pelanggaran mulai dari penerimaan laporan hingga keluarnya sebuah putusan dengan mengedepankan fungsi koordinasi dan komunikasi.

Fungsi koordinasi dan komunikasi ini sangat penting untuk menunjang suksesnya penyelenggaraan pemilu Tahun 2024 mendatang. Sebagai langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bawaslu menganggap komunikasi ini penting demi menunjang dan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk diperbantukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.



Roy M Siagian
(Kepala Sekretariat Bawaslu Babel)

Pentingnya SDM ini agar pelaksanaan tugas-tugas pengawasan menjadi lebih mudah dilaksanakan dengan dukungan Tim Kesekretariatan yang maksimal serta pemahaman dan Pendidikan yang mumpuni untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi di Lembaga pengawas pemilu.

Dalam melaksanakan fungsi anggaran Bawaslu juga melaksanakannya dengan efektif efisien dan akuntabel. Efektif dalam penggunaan anggaran maksudnya Bawaslu melaksanakan kegiatan dan program kerja berdasarkan *time line* yang sudah ditetapkan. Artinya agenda yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung benar benar agenda yang berpedoman pada pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan mulai dari pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran.

Efisien yang dimaksud Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penggunaan anggaran sesuai dengan *time line* waktu yang sudah ditentukan. Sehingga meminimalisir kesalahan dan perubahan penggunaan anggaran berdasarkan yang sudah ditetapkan. Sedangkan akuntabel Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penggunaan anggaran sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan secara akurat dan tepat sasaran demi mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu Tahun 2024.

Sebagai sebuah Lembaga negara, selain pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel tentu Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memaksimalkan penyerapan anggaran Tahun 2022. Penyerapan anggaran juga dilakukan sesuai dengan *time line* kegiatan yang sudah dilakukan dan tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas, artinya meskipun penyerapan anggaran maksimal juga diimbangi sesuai dengan penggunaannya dan regulasi yang sudah ditentukan. Pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Ketua Bawaslu Babel, EM Osykar saat melakukan pengawasan proses verifikasi vaktual di Partai Hanura bersama KPU Provinsi Babel dalam Pemilu 2024
(Senin, 17 Oktober 2022)



Anggota Bawaslu Babel, Dewi Rusmala saat melakukan pengawasan proses verifikasi vaktual di Partai Buruh bersama KPU Provinsi Babel dalam Pemilu 2024
(Senin, 17 Oktober 2022)



Anggota Bawaslu Babel, Jafri saat melakukan pengawasan proses verifikasi vaktual di Partai Bulan Bintang bersama KPU Provinsi Babel dalam Pemilu 2024
(Senin, 17 Oktober 2022)



Anggota Bawaslu Babel, Sahirin saat melakukan pengawasan proses verifikasi vaktual di Partai Garuda bersama KPU Provinsi Babel dalam Pemilu 2024
(Senin, 17 Oktober 2022)



Kepala Sekretariat Bawaslu Babel, Roy M Siagian saat melakukan pengawasan proses verifikasi vaktual di Partai Kebangkitan Nusantara bersama KPU Provinsi Babel dalam Pemilu 2024
(Senin, 17 Oktober 2022)



Ketua Bawaslu Babel, EM Osykar melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kota Pangkalpinang, **Sabtu (22/10/2022)**



Anggota Bawaslu Babel, Dewi Rusmala melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Belitung, **Sabtu, (22/10/2022)**



Anggota Bawaslu Babel, Sahirin melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan di Kecamatan Simpang Rimba, Bangka Selatan. **Sabtu, (22/10/2022)**

PPID BAWASLU BABEL
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



<https://ppid.babel.bawaslu.go.id/>

**Permohonan
Informasi Lebih
Mudah**

**Ingin
Mendapatkan
Produk Hukum
BAWASLU**



JDIH BAWASLU
Jaringan Data Informasi Hukum
<https://jdih.bawaslu.go.id/>

